

## Analisis Kegagalan Dinasti Politik di Kota Sungai Penuh Tahun 2020

Dimas Rizal\*, A. Zarkasi

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Politik, Universitas Jambi

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Jambi

\*Correspondence email: dimas.rizal@unja.ac.id

**Abstrak.** Demokrasi yang baik dapat dilihat dari peluang semua orang yang terlibat dalam proses politik. Membuka peluang partisipasi masyarakat untuk memperebutkan jabatan politik di tingkat daerah dan nasional sesuai ketentuan yang berlaku. Bahkan, masyarakat terhambat oleh status sosial akibat adanya dinasti politik. Kehadiran dinasti politik di tingkat daerah dan nasional membuat substansi demokrasi sulit diterapkan. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik purposive sampling dengan teknik wawancara dengan sumber informasi langsung. Serta data sekunder yang berasal dari berbagai referensi seperti dokumen dan website yang berisi data-data yang dibutuhkan penulis dalam penelitian ini. Hasil penelitian Pasangan Ahmadi-Alvia unggul secara signifikan dalam faktor demografi, karena pasangan ini berasal dari kecamatan Pesisir Bukit dan Pondok Tinggi yang secara demografi sangat beruntung. Dan tagline “berubah” juga menjadi kunci sukses pasangan ini, karena Fikar Azami adalah anak dari Walikota Sungai Penuh dua periode sebelumnya. Sehingga masyarakat melihat sosok Ahmadi-Alvia sebagai sosok yang dapat mengubah Kota Sungai Penuh dengan visi “Mewujudkan Kota Sungai yang Sepenuhnya Maju (Mandiri, Religius, Jujur, Unggul) dan Adil”.

**Kata kunci :** Pelayanan Politik; Demokrasi; Perilaku Politik.

**Abstract.** A good democracy can be seen from the opportunities of all people involved in the political process. Opening opportunities for public participation to compete for political positions at the regional and national levels according to applicable regulations. In fact, the community is hampered by social status as a result of the existence of a political dynasty. The presence of political dynasties at the regional and national levels makes the substance of democracy difficult to implement. The approach taken in this study uses a descriptive qualitative approach with purposive sampling technique with interview techniques with direct sources of information. As well as secondary data that comes from various references such as documents and websites that contain the data needed by the author in this study. The results of the research of the Ahmadi-Alvia Pair were significantly superior in demographic factors, because this pair came from the Pesisir Bukit and Pondok Tinggi sub-districts which were very lucky demographically. And the tagline "change" is also the key to the couple's success, because Fikar Azami was the son of the Mayor of Sungai Full two previous terms. So that people see the Ahmadi-Alvia figure as a figure who can change the Full River City with the vision of "Creating a Fully Advanced River City (Independent, Religious, Honest, Superior) and Just".

**Keywords :** Political Service; Democracy; Political Behavior.

### PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung bertujuan untuk mendekatkan kedaulatan ditangan rakyat. Pilkada secara langsung mengindikasikan semakin baiknya kualitas demokrasi dikarenakan partisipasi langsung masyarakat dalam memilih calon pemimpinnya di daerah tanpa adanya dorongan dan tekanan dari pihak manapun. Dalam Pilkada secara langsung diharapkan adanya kompetisi calon pemimpin secara demokratis, adil dan jujur. Sehingga hal ini diharapkan pemimpin terpilih mendapatkan dukungan dari masyarakat. Demokrasi yang baik dapat dilihat dari peluang semua masyarakat terlibat dalam proses politik. Terbukanya peluang partisipasi masyarakat untuk memperebutkan jabatan politik di level regional maupun nasional sesuai aturan yang berlaku. Pada kenyataan masyarakat mendapat hambatan dari status sosial sebagai akibat dari adanya political dynasty. Demokrasi mempunyai arti kekuasaan politik dijalankan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, maka dinasti politik telah menciptakan

pandangan politik yang mendorong kalangan keluarga dari kepala daerah untuk menduduki jabatan publik.

Dalam kajian akademik, demokrasi menurut Schumpeter (Huntington, 1991) adalah sebuah metode yang memiliki prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik dimana individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan politik melalui kompetisi merebut suara rakyat dalam pemilu. Politik Dinasti”, dinasti politik undang terhadap merebak dikarenakan tiga faktor, yakni kekuatan modal financial, kekuatan jaringan, dan posisi dalam partai. Selama ini belum ada pembatasan oleh undang- berkembangnya dinasti politik di satu wilayah ataupun dalam parpol, sehingga berkembangnya dinasti politik sulit disalahkan

Fenomena dinasti politik dalam ranah lokal muncul seiring dengan diberlakukannya Pemilu langsung pertama kali di Indonesia pada tahun 2005 maupun implementasi otonomi daerah tahun 2001. Seiring dengan berjalannya kedua proses tersebut sebagai wujud demokratisasi di tingkat lokal, berbagai elit bermunculan di daerah untuk mengkooptasi kedua proses tersebut (Wasisto, 2013). Kemunculan para elit

dalam demokrasi lokal tersebut lazim dikenal dalam istilah reorganisasi kekuasaan. Reorganisasi ini diartikan sebagai kembalinya pengaruh kekuasaan politik elit lokal ke dalam era demokrasi. Selama Orde Baru berkuasa, kekuasaan para elit ini dibatasi oleh pusat yang lebih cenderung pada mekanisme pengangkatan maupun penunjukkan langsung. Hal inilah yang membuat elit lokal terbelah menjadi dua, yakni sebagai pelayan Orde Baru sehingga mendapatkan keistimewaan politik dan elit lokal penentang yang tidak menyukai kepemimpinan Orde Baru sehingga tersingkir dalam arena politik lokal di daerahnya.

Hadirnya dinasti politik pada tingkatan regional dan nasional menimbulkan substansi demokrasi sulit untuk di implementasikan. Terdapat beberapa faktor tumbuh dan berkembangnya dinasti politik khususnya di daerah antara lain peran dari partai politik dan regulasi Pilkada. Oligarki di dalam partai politik membuat tata cara pemilihan calon pemimpin tidak sesuai dengan yang diharapkan. Terdapat kecenderungan yang mengarahkan calon kandidat pemimpin berdasarkan keinginan elit partai. Dalam waktu bersamaan, dinasti politik membentuk jaringan yang kuat supaya tetap mempertahankan kekuasaannya baik dalam partai politik di daerah ataupun pusat. Kehadiran dinasti politik yang melingkupi perebutan kekuasaan di level regional hingga nasional mengakibatkan substansi dari demokrasi sendiri sulit diwujudkan. Tumbuh suburnya dinasti politik khususnya di daerah tidak terlepas dari peran partai politik dan regulasi tentang Pilkada. Oligarki di tubuh partai politik menyebabkan mekanisme kandidasi dan pencalonan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Selama ini terdapat kecenderungan pencalonan kandidat oleh partai politik berdasarkan keinginan elit partai, bukan melalui mekanisme yang demokratis dengan mempertimbangkan kemampuan dan integritas calon. Secara bersamaan, dinasti politik terus membangun jejaring kekuasaannya dengan kuat agar tetap dapat mempertahankan kekuasaannya dalam tubuh partai baik di tingkat daerah maupun pusat. Sehingga dapat dipastikan dinasti politik mampu menguasai dan mematikan demokrasi dalam partai politik. Dalam konteks masyarakat sendiri juga muncul sinyalemen upaya menjaga status quo di daerahnya dengan mendorong kalangan keluarga atau orang dekat untuk menjadi kepala daerah menggantikan petahana yang akan purna dari tugasnya.

Dinasti politik dapat meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya ketidakmerataan distribusi pada kekuasaan yang bisa mencerminkan ketidaksempurnaan pada demokrasi yang dikenal kekuasaan melahirkan kekuatan. Dalam hal ini mengingatkan kekhawatiran Mosca, bahwa setiap kelas menampilkan kecenderungan untuk menjadi turun-temurun, serta saat posisi politik terbuka untuk semua, kedudukan keluarga penguasa akan dianugerahi berbagai keuntungan (Synder et al, 2009). Kajian ilmu sosial dan politik, familisme merupakan budaya politik yang dapat

diartikan ketergantungan yang terlalu besar pada hubungan keluarga, dapat menimbulkan kebiasaan menempatkan keluarga dan ikatan kekerabatan pada kedudukan jabatan publik yang lebih tinggi. Dalam pengertian lainnya dapat dipahami sebagai dorongan psikologis seseorang agar berkarir di dalam dua tempat yaitu publik sebagai birokrat dan privat sebagai korporat-swasta (Garzon, 2002).

Pilkada serentak tahun 2020 menyisakan sebuah realita kegagalan dari dinasti politik yang dibangun di Kota Sungai Penuh. Asafri Jaya Bakri merupakan Walikota Sungai Penuh dua periode yang dimulai pada periode pertama 2011-2016, dilanjutkan 2016-2021. Putri Walikota Sungai Penuh Ezzaty terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2019-2024. Dilanjutkan dengan putra Walikota Sungai Penuh Fikar Azami yang menduduki kursi legislatif Kota Sungai Penuh Periode 2014-2019. Pada periode ini Fikar Azami tahun 2017-2019 menjadi ketua DPRD Kota Sungai Penuh. Dilihat dari trah dinasti politik yang dibangun di Kota Sungai Penuh, seharusnya Fikar Azami sekaligus anak dari Walikota Sungai Penuh dapat memenangkan Pilkada yang dilaksanakan Pada tanggal 9 Desember 2020 dikarenakan dukungan dari berbagai aspek antara lain faktor elit politik, oligarki politik serta dukungan dari partai politik dalam hal ini 10 partai politik. Tetapi pada kenyataannya dilapangan justru calon Fikar Azami dikalahkan oleh pesaingnya yaitu Ahmadi Zubir yang berpasangan dengan Alvia Santoni yang berasal dari kalangan akademisi. Tentu hal ini menjadi menarik untuk diteliti.

Pada Penelitian ini, Peneliti ingin menjawab faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kegagalan dari dinasti politik yang dibangun di Kota Sungai Penuh. Sehingga dapat menjadi temuan secara ilmiah bahwa dinasti politik tidak selamanya bisa menang dan dipertahankan. Berdasarkan penjelasan dan paparan di atas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul Analisis Kegagalan Dinasti Politik di Kota Sungai Penuh Pada Tahun 2020.

## **METODE**

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berangkat dari perspektif fokus penelitian yang mengacu pada kualitas makna (Moleong: 2007). Metode pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan yang didukung oleh media cetak seperti buku, majalah, surat kabar, jurnal, laporan dari berbagai sumber, dan juga media elektronik, terutama internet di mana data merupakan sumber sekunder. Selain data sekunder diatas penulis juga menggunakan data primer yang didapatkan dari wawancara bersama pihak yang kompeten dalam menjawab persoalan penelitian ini. Setelah didapatkan datanya, maka data-data diatas akan dianalisis dalam kerangka teoritis yang telah ditentukan untuk membuktikan bahwa hipotesis itu akurat dan akhirnya dapat menjawab pertanyaan

penelitian. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis deskriptif untuk lebih mudah dalam menggambarkan Faktor penyebab kegagalan dinasti politik di Kota Sungai Penuh tahun 2020. Untuk mensistematisasikan data yang dikumpulkan, analisis ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: reduksi data, pemaparan data, deskripsi, dan verifikasi serta menarik kesimpulan.

## HASIL

Dinasti politik dan politik dinasti adalah dua hal yang berbeda. Dinasti politik adalah sistem reproduksi kekuasaan yang primitif karena mengandalkan darah dan keturunan dari hanya beberapa orang. Politik dinasti adalah proses mengarahkan regenerasi kekuasaan bagi kepentingan golongan tertentu (contohnya keluarga elite) yang bertujuan mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan. Dinasti politik merupakan musuh demokrasi karena dalam demokrasi, rakyatlah yang memilih para pemimpinnya. Dinasti politik merupakan suatu cara untuk melahirkan kekuasaan yang primitif dikarenakan mengandalkan darah dan keturunan dari hanya beberapa orang. Menurut Kurtz (1989) dalam artikelnya yang berjudul "The Political Family: A Contemporary View" mensyaratkan politikal family harus didasarkan minimal 2 orang dalam keluarga yang terlibat dalam perpolitikan dan menduduki jabatan politik. Dinasti politik merupakan musuh demokrasi karena dalam demokrasi rakyatlah yang memilih para pemimpinnya. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dalam politik dan ikut serta dalam pemerintahan. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) juga merupakan proses demokrasi di Indonesia, pilkada yang telah dilaksanakan di Kota Sungai Penuh, dimana pemilih diberikan kebebasan untuk menentukan pemimpin di daerahnya. Berikut ini merupakan fenomena yang terjadi pada pemilihan walikota dan wakil walikota serta alasan mereka menjatuhkan pilihan pada salah satu kandidat yang pada akhirnya mengalahkan dan meruntuhkan dominasi dari dinasti politik yang sudah terbentuk.

### *Proses Terbentuknya Dinasti Politik*

Secara umum, basis fondasi kekuasaan formal dinasti politik lokal di Indonesia dibangun berdasarkan hubungan paternalistik melalui redistribusi program populis yang dihasilkan melalui skema politik 'gentong babi' (*pork barrel politics*) maupun politisasi siklus anggaran (*politic budget cycle*). Hal itulah yang kemudian mendorong adanya hubungan kedekatan maupun romantisme antara pemimpin dengan rakyatnya sehingga pemimpin mudah dalam membentuk politik persuasif melalui gelontoran uang hingga ke pelosok. Berkaitan dengan sebuah agenda suksesi kepemimpinan, politisasi birokrat maupun sosialisasi tokoh informal masyarakat menjadi bagian intimitas yang bertindak sebagai agen intermediasi dalam memenangkan dan melanggengkan kekuasaan famili politik. Perbincangan

mengenai dinasti politik dalam ranah politik lokal sangatlah berbeda dengan konteks dinasti politik yang terjadi di level nasional. Dalam ranah lokal, romantisasi nama besar familisme menjamin suatu dinasti politik dapat eksis secara terus-menerus. Familisme sendiri dibentuk atas tiga hal, yakni figur (*personalism*), klientelisme (*clientelism*), dan tribalisme (*tribalism*), sebagai ketiga kunci dalam mengurai basis-basis terbentuknya tren familisme kekuasaan dalam demokrasi lokal di Indonesia (Allen, 2012).

Ketiga proses tersebut berperan besar dalam suksesi pemerintahan lokal di Indonesia yang dilakukan dalam dua jenis yakni secara *by design* dan *by accident*. Dinasti politik yang *by design* sudah terbentuk sejak lama dimana jejaring familisme dalam pemerintahan sendiri sudah kuat relasionalnya sehingga kerabat yang ingin memasuki kancah pemerintahan maupun politik sudah didesain sejak awal untuk menempati pos tertentu. Adapun *by accident* sendiri terjadi dalam situasi suksesi pemerintahan yang secara tiba-tiba mencalonkan kerabat untuk menggantikannya demi menjaga kekuasaan "informal" terhadap penggantinya kelak jika memang dalam Pemilu.

Dalam mayoritas kasus Pemilu di Indonesia sendiri, suksesi kekuasaan berbasis familisme ada yang dilakukan secara *by accident* maupun *by design* di berbagai kabupaten/kota. Model *by design* yang dominan adalah istri yang maju menggantikan suami atau anak menggantikan bapaknya. Sementara itu, model *by accident* adalah kerabat sebagai calon kepala daerah hanya sebagai bayangan atas kerabat lain yang difavoritkan akan memenangkan Pemilu. Pola pengajuan kandidat tersebut biasanya dilakukan secara sporadis untuk menghalangi calon lain maju dalam proses pengajuan kandidat. Dapat dikatakan bahwa intimitas hubungan keluarga kemudian menjadi platform politik guna mengamankan kekuasaan daerah. Pola suksesi aksidental dalam model dinasti politik seperti ini kerap kali memunculkan anekdot kuasa gono-gini ataupun 'arisan kekuasaan' karena transisi kekuasaan daerah hanya terjadi di dalam satu rumah saja. Selain itu, tren familisme dalam dinasti politik aksidental seperti ini tidak akan bertahan lama. Hal ini karena regenerasi kekuasaan tidak dilakukan secara matang, melainkan hanya mengejar pragmatisme politik belaka.

### *Partisipasi Politik*

Partisipasi politik adalah kegiatan sukarela dari masyarakat dimana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan secara langsung maupun tidak langsung (Miriam Budiardjo, 2008). Dari tingkat partisipasi ini kita bisa melihat elektabilitas dari masyarakat terhadap para calon pada pemilihan kepala daerah di kota Sungai Penuh. Dari hasil penelitian diperoleh data partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah kota sungai penuh sebesar 82,6%. Partisipasi ini melebihi dari target KPU Kota Sungai Penuh sebesar 77,5%. Dari tingkat partisipasi politik

masyarakat dapat kita simpulkan bahwa dua kandidat calon yaitu dari no urut 1 yaitu Ahmadi Zubir-Alvia Santoni dan no urut 2 Fikar Azami-Yos Adrino, memiliki elektabilitas yang tinggi ditengah masyarakat Kota Sungai Penuh yang dibuktikan dengan masyarakat berpartisipasi sebesar 82,6%.

### Perilaku Pemilih

Perilaku pemilih adalah tingkah laku dari seseorang untuk menentukan pilihan yang di rasa paling cocok dan yang paling disukai sesuai dengan keinginan setiap individu masyarakat. Dalam menganalisis perilaku pemilih kita lakukan dengan pendekatan sosiologis, pendekatan Psikologis dan Pendekatan Rasional.

#### 1. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologi pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan-pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan pilihan pemilih seseorang. Dimana karakteristik atau latar belakang sosiologis seperti wilayah, jenis kelamin, sosio ekonomi, tempat tinggal, pekerjaan, umur, pendidikan, kelas, pendapatan dan agama merupakan faktor penting dalam menentukan pilihan politik. Dari Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan Ahmadi Zubir-Alvia Santoni unggul pada wilayah demografi yang luas dengan jumlah penduduk yang banyak dan berpartisipasi pada pemilihan Wali Kota Sungai Penuh dibuktikan dengan hasil pemilihan pada wilayah Hamparan Rawang dengan Jumlah Suara sah pada pemilihan 9.755, Pondok Tinggi dengan Jumlah Suara sah pada pemilihan 9.612, serta Pesisir bukit dengan Jumlah Suara sah pada pemilihan 7.619. Dari tiga wilayah terbesar dan jumlah suara sah terbanyak dari 8 kecamatan yang berada di Kota Sungai Penuh di menangkan oleh pasangan Ahmadi Zubir-Alvia Santoni. Selanjutnya pasangan Ahmadi Zubir-Alvia Santoni juga unggul pada aspek pekerjaan karena dua pasangan calon merupakan Dosen di dua sekolah Tinggi yang berada di Kota Sungai Penuh, sehingga basis milenial dan berpendidikan cukup besar yang tersebar disemua wilayah Kota Sungai Penuh. Serta dari hasil hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat pada figur yang lebih tua karena di anggap lebih matang dalam mengambil suatu kebijakan untuk perkembangan Kota sungai Penuh 5 tahun kedepan.

#### 2. Pendekatan Psikologis

Pendekatan Psikologis merupakan pengaruh jangka pendek dan panjang dari persepsi pribadi seseorang terhadap calon/kandidat tergantung dari sejauh mana tema-tema (visi dan misi) para calon. Faktor yang mendorong pemilih menentukan pilihannya, yaitu: identifikasi partai, orientasi kandidat, dan orientasi isu/tema. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu faktor yang menjadi kunci kemenangan dari pasangan Ahmadi Zubir-

Alvia Santoni mengangkat tagline “perubahan” yang di kedepankan di saat kampanye dengan visi Mewujudkan Kota Sungai Penuh Maju (Mandiri, Agamis, Jujur, Unggul) dan Berkeadilan.

Figur wakil Wali Kota Sungai Penuh merupakan kunci kemenangan dari pasangan Ahmadi Zubir-Alvia Santoni, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat melihat alvia santoni sebagai sosok muda dan kharismatik dikalangan ibu-ibu. Hal ini terlepas dari faktor tingkat pendidikan dan demografi asal dari alvia santoni yang berada pada wilayah dengan jumlah penduduk terbesar no 2 di kota sungai penuh.

#### 3. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan Pilihan Rasional Merupakan pilihan para pemilih sejauh mana kinerja pemerintah, partai, atau wakil-wakil mereka baik bagi dirinya sendiri atau bagi negaranya. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat sebagian besar tidak mempertimbangkan tentang partai pengusung dari pasangan calon, masyarakat lebih tertarik kepada figur calon itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan Rasional tidak terlalu dominan dalam mempengaruhi masyarakat untuk memilih calon pemimpin di Kota Sungai Penuh.

### SIMPULAN

Hasil pemilihan Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020 pasangan Ahmadi-Alvia unggul dari pasangan Fikar-Yos dengan suara dengan selisih 2,88% suara, pasangan Ahmadi-Alvia mendapatkan suara 51,445, dan Fikar-Yos dengan 48,56% suara. Dari hasil penelitian menunjukkan ada beberapa faktor yang menjadi faktor kemenangan dari pasangan Ahmadi-Alvia, antara lain:

1. Pasangan Ahmadi-Alvia unggul signifikan pada faktor demografi, dikarenakan pasangan ini berasal dari kecamatan Pesisir Bukit dan Pondok Tinggi yang secara demografi sangat diuntungkan. Karena merupakan wilayah yang termasuk tiga besar jumlah daftar pemilih tetap terbesar di Kota Sungai Penuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan calon Ahmadi-Alvia juga mendapatkan kemenangan mutlak pada dua kecamatan asalnya, yaitu di kecamatan Pesisir Bukit pasangan ini mendapatkan 74,55% suara sah, dan kecamatan Pondok Tinggi pasangan mendapatkan kemenangan 59,86% suara sah. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota sungai Penuh masih melihat figur calon pemimpin dari demografi yang sama.
2. Tagline “perubahan” juga menjadi kunci sukses dari pasangan ini, dikarenakan Fikar Azami merupakan anak Wali Kota Sungai Penuh dua periode sebelumnya. Sehingga masyarakat melihat figur Ahmadi-Alvia sebagai figur yang bisa merubah Kota Sungai Penuh dengan dengan Visi “Mewujudkan Kota Sungai Penuh Maju (Mandiri, Agamis, Jujur, Unggul) dan Berkeadilan”.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam, 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Firmanzah, 2012. *Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realita*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Huntington, SP. 1991. *Gelombang demokratisasi Ketiga*. Jakarta: PT. Intermedia.
- Haryanto. 2007. *Kekuasaan Elite: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: PolGov Press
- Matthew, B. M., & Huberman, A.M. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta; UI.Press.
- Setiadi Elly M, Usman Kolip, 2013. *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta Kencana Pena Media Group.
- Miles, M. B., Huberman, M. A., & Saldana, J. 2014. *Drawing and verifying conclusions. Qualitative data analysis: A methods sourcebook*
- Mietzner, Marcus. 2009. Indonesia's 2009 Elections: Populism, Dynasties and the Consolidation of the Party System. *Journal of Contemporary Asia*.
- Syamsudin, Haris. 2007. *Pemilu Langsung di tengah Oligarki Partai*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sidel, John. 2005. *Bosisme dan Demokrasi di Filipina, Thailand dan Indonesia*", Politisasi Demokrasi Politik Lokal Baru, edited by John Hariss. Jakarta: Demos.
- Synder, dkk. 2009. Political Dynasties. *Los Angeles: The Review of Economic Studies*, Edisi: 76, 115–142.
- Wasisto, Raharjo Djati. 2013. Revivalisme kekuatan familisme : dinasti politik di aras lokal. *Jurnal Sosiologi masyarakat*. 18(2).